

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya terkait penyitaan informasi elektronik sebagai alat bukti. Penyitaan terhadap perangkat elektronik memiliki potensi menimbulkan persoalan hukum karena di dalamnya dapat memuat data pribadi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturan penyitaan informasi elektronik saat ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional, namun masih terdapat persoalan mengenai batas kewenangan penyidik dan perlindungan hak privasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyitaan informasi elektronik dalam UU ITE dan KUHP Nasional serta apakah pengaturan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan penyitaan informasi elektronik, hak privasi, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif melalui penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum mengenai pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti serta objek penyitaan. Namun, pengaturan mengenai mekanisme teknis penyitaan informasi elektronik masih belum secara rinci mengatur tata cara pengambilan data, pemilahan informasi yang relevan, pembatasan akses terhadap data pribadi, serta perlindungan terhadap data yang tidak berkaitan dengan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekaburan norma yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam perlindungan hak privasi.

Kata Kunci: Penyitaan, Informasi Elektronik, Hak Privasi, Kepastian Hukum, Proporsionalitas

ABSTRACT

Advances in information technology have brought about changes in the criminal law enforcement process, particularly regarding the seizure of electronic information as evidence. The seizure of electronic devices has the potential to raise legal issues because they may contain personal data unrelated to criminal offenses. The regulation of electronic information seizure is currently governed by the Electronic Information and Transactions Law and the National Code of Criminal Procedure; however, issues remain regarding the limits of investigators' authority and the protection of privacy rights. Based on this, this study examines how the seizure of electronic information is regulated in the Electronic Information and Transactions Law and the National Code of Criminal Procedure, and whether these regulations comply with the principles of legal certainty and proportionality.

This study is a normative legal study that employs both a statutory and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal sources, namely laws and regulations, and secondary legal sources, namely legal literature related to the seizure of electronic information, the right to privacy, legal certainty, and proportionality. The analysis of the legal materials was conducted descriptively through legal interpretation.

The research findings indicate that the ITE Law and the National Criminal Procedure Code have established a legal basis for recognizing electronic information as evidence and as a subject of seizure. However, the regulations governing the technical mechanisms for seizing electronic information still do not provide detailed provisions regarding data collection procedures, the filtering of relevant information, restrictions on access to personal data, and the protection of data unrelated to the case. This situation indicates that there remains a lack of clarity in the regulations, which has the potential to affect legal certainty and the application of the principle of proportionality in the protection of privacy rights.

Keywords: Seizure, Electronic Information, Privacy Rights, Legal Certainty, Proportionality